

DAFTAR PUSTAKA

- Ardiyose. 2013. Kamus Besar Akuntansi. Jakarta: Citra Harta Prima.
- Badrudin, R. 2017. Ekonomi Otonomi Daerah (Edisi 3, C). Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2017
- Bastian, Indra, (Dosen Fakultas Ekonomi, UGM) 2006. *Akuntansi Sektor Publik : Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Erlangga
- Bastian, Indra, 2010. *Akuntansi Sektor Publik : Suatu Pengantar*. Yakarta : salemba Empat.
- Cindy, R. A. (2019). *Prosedur Penyusunan Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Padang*. Padang: Universitas Andalas. *Ekonomi*, 12(1), 115-126.
- Fuad, M, Edy, S dkk. 2020. Anggaran Perusahaan. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Halim, A., Kusufi, M. 2014. Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi 4. Jakarta Salemba Empat
- Halim, Abdul. 2017. Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta. Salemba Empat.
- Harefa. 2016. Kendala Implementasi dan Efektifitas Pemungutan pajak PBB, P2 oleh pemerintahan Kota Makassar
- Herlianto, Didit. 2015. Anggaran Keuangan. Gosyen Publishing. Yogyakarta.
- Mahmudi. 2015. Manajemen Kinerja Sektor Publik Edisi 3. Yogyakarta : Unit Penerbitan dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen. YKPN.
- Mahsun, Muhammad. 2018. Pengukuran Kinerja Sektor public. Edisi Pertama. Yogyakarta. BPFE.
- Mahsun. 2019. Pengukuran Kinerja Sektor Publik Tangerang Selatan. Universitas Terbuka
- Mardiasmo.(2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Mediaty dan Syarifuddin. 2010. *Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah dengan Budaya Organisasi dan Sebagai Moderator (studi kasus pada pemerintahan kabupaten barruSul-Sel)*. Jurnal Ekonomi. Selawesi Selatan.
- Mulyadi. 2013. Sistem Informasi Akuntansi. Jakarta. Erlangga. Mulyadi. 2016. Sistem

Akuntansi. Jakarta. Salemba Empat.

Nafarin, M. 2013. Penganggaran Perusahaan. Edisi III. Jakarta. Salemba Empat.

Nordiawan, Deddi., Hertianti, Ayuningtyas. 2010. Akuntansi Sektor Publik.

Penyusunan anggaran. (2014,09 maret). *Proses penyusunan anggaran*. Diakses pada 15 Maret 2020, dari <https://rowlandpasaribu.files.wordpress.com/penyusunan.anggaran.com/>

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34 / PMK / 03/ 2005 Tanggal 23 Mei.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang pembagian hasil penerimaan pajak bumi dan bangunan.

Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. <https://peraturan.bpk.go.id>Details>.

Priyantono, H., Baga, L. M., & Falatehan, A. F. (2017). Strategi Optimalisasi Penyerapan Anggaran Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.

Renja Biro Organisasi Kantor Gubernur Sumatera Barat tahun 2024. Salemba Empat, Jakarta

Sardjito, Bambang dan Osmad Mothaher. 2007. *Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran terhadap Kinerja Pemerintah Aparat Daerah : Budaya Organisasi dan Domitmen Organisasi sebagai Variabel Moderating*. SNAX.

Sasongko, C, Parulian, S. R. 2016. Anggaran. Jakarta: Salemba Empat

Silalahi, N. A. (2022). Pembentukan Perangkat Kepatuhan Persaingan Usaha sebagai Strategi untuk Meningkatkan Kepatuhan Persaingan Usaha. *Jurnal Persaingan Usaha*, 2(1), 30-42.

Sri Rahayu, Shinta. 2007. *Prosedur Penyusunan Anggaran dan Realisasi Anggaran pada Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh*. Padang : Universitas Andalas

Suhardi. 2019. Pengaruh Motivasi Kerja, Kompetensi, Lingkungan Kerja dan Kompensasi Terhadap Kinerja Karyawan PT. Asuransi Jiwa di Kota Batam dengan Organizational Citizenship Behavior Sebagai Variabel Intervening, Batam : Universitas Putra Batam.

Sumbarprov.go.id 2021. Informasi Pedoman Penyusunan APBD melaluisystem Online.

Diakses pada tahun 2022, dari <https://ppid.sumbarprov.go.id/>

Susilowati, D., Sitinjak, C. A. D., & Juwari, J. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Terhadap Belanja Daerah Kota Balikpapan. *Jurnal Geo*

Tendi Haruman dan Sri Rahayu. 2007. *Penyusunan Anggaran Perusahaan*.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Daerah.

Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

Wulandari. 2011. *Pengaruh partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja aparatpemerintah daerah : kepuasan kinerja dan komitmen organisasi sebagai variablemoderating (studi empiring pada pemerintah daerah Kabupaten Demak)*. Skripsi. Universitas Diponegoro Semarang Yogyakarta :GrahaIlmu.

